



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Arungbinang No. 15 Kebumen Telepon/Fax (0287) 384088
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id
Facebook : kesbangpol Twitter : @kesbangpol.kbm

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 700 / 70 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kebumen,



Widiatmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
NOMOR 700 /70 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan.					
1.1		Meningkatkan stabilitas keamanan daerah		Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikalisme dan sumber daya ekonomi	Formulasi Pengukuran: (Jumlah potensi konflik yang ditangani tahun n/jumlah potensi konflik yang ada pada tahun n) x 100% Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan	1. Konflik Berlatar Belakang SARA. Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Politik Kabupaten Kebumen	2. Konflik Berlatar Belakang Ideologi. Konflik yang muncul akibat pertentangan nilai, prinsip, atau sistem keyakinan ideologis, serta tindakan yang berupaya menolak, menentang, atau mengganti ideologi yang berlaku sehingga memengaruhi stabilitas sosial-politik. 3. Konflik Berlatar Belakang Politik. Konflik yang timbul karena perbedaan kepentingan politik, orientasi partai, atau perebutan kekuasaan yang ditunjukkan melalui perselisihan, mobilisasi massa, atau tindakan yang mengganggu proses politik dan pemerintahan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
						4. Konflik Berlatar Belakang Radikalisme. Konflik yang disebabkan oleh penyebaran atau tindakan berbasis paham ekstrem yang menolak nilai dasar negara dan mendorong perubahan melalui cara-cara kekerasan, intoleransi, atau propaganda yang mengancam keamanan nasional. 5. Konflik Berlatar Belakang Sumber Daya Ekonomi. Konflik yang terjadi akibat perebutan, ketidakadilan akses, atau sengketa pemanfaatan sumber daya ekonomi (lahan, air, tambang, usaha, atau modal) yang menimbulkan perselisihan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1.1.1			Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Formulasi Pengukuran: Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Konflik SARA adalah Konflik yang terjadi akibat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, yang ditandai oleh munculnya ujaran, tindakan, atau sikap yang menyinggung identitas kelompok sehingga memicu ketegangan atau gangguan ketertiban sosial.
1.1.1.1			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: 1. Persyaratan pelayanan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian.	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta yang paham tahun (n) / Jumlah target peserta tahun (n) *100% Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilih	Persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan	Formulasi Pengukuran : Jumlah peserta yang paham tahun (n) / Jumlah target peserta tahun (n) *100% Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			an umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.		
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	Formulasi Pengukuran : jumlah ormas yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan / jumlah ormas aktif yang terdata x 100% Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan	Formulasi Pengukuran : jumlah laporan hasil penjaringan informasi tahun (n) / jumlah	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			konflik sosial dan kerjasama intelejen	kerjasama intelejen	target penjangkaran informasi tahun (n) *100% Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kebumen, 15 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen,



Widiatmoko